

Pengenalan Keselamatan Lalu Lintas Usia Dini Program Kerja Desa Berbasis Dana Desa

Muhammad Darwis¹

^{1,2} Dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Khairun

³ Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Khairun

Email : dottoroto27damara@gmail.com

ABSTRAK

Pulau Maitara merupakan salah satu kawasan wisata di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara yang terletak diantara Pulau Tidore dan sekatan Pulau Ternate adalah suatu bongkahan pulau kecil yang alamiah berpenduduk 1900 jiwa dengan keramah-tamahan, budaya dan jiwa sosialnya yang tinggi serta menyimpan kekayaan yang potensial untuk pengembangan sebagai kawasan wisata. Dengan demikian, berdasarkan potensi yang ada di daerah ini, kegiatan dari PKM ini sangat berpeluang besar sebagai upaya peningkatan ekonomi di tingkat keluarga guna mewujudkan kesejahteraan desa. Dalam pelaksanaannya, dana desa mulai dialokasikan dalam APBN sejak 2015 sebesar Rp. 20,76 triliun. Dalam periode 2015-2020, alokasi dana desa melalui APBN telah mencapai Rp. 328,07 triliun. Pagu Dana Desa Tahun 2022 telah ditetapkan sebesar Rp. 68 triliun dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota se-Indonesia. Berdasarkan pantauan, selama tahun 2021, secara umum permasalahan dana desa dapat dilihat dari aspek perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan dan pengawasan pengelolaan dana desa belum berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, peningkatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan pengelolaan dana desa menjadi kewajiban yang harus dilakukan.

Kata Kunci: Dana Desa, Program Kerja, Lalu Lintas

ABSTRACT

Maitara Island is one of the tourist areas in the City of Tidore Archipelago, North Maluku Province, which is located between Tidore Island and the border of Ternate Island, is a natural small island with a population of 1900 people with high hospitality, culture and social spirit as well as a wide range of potential wealth for development as a tourist area. Thus, based on the potential that exists in this area, the activities of this PKM have a great opportunity as an effort to improve the economy at the family level in order to realize village welfare. In practice, village funds have been allocated in the state budget since 2015 in the amount of Rp. 20.76 trillion. In the 2015-2020 period, the allocation of village funds through the APBN has reached Rp. 328.07 trillion. The village fund ceiling for 2022 has been set at Rp. 68 trillion and allocated to 74,961 villages in 434 districts/cities throughout Indonesia. Based on monitoring, during 2021, in general village fund problems can be seen from the aspects of planning, management and accountability. This shows that the assistance and supervision of village fund management has not run optimally. Therefore, increasing guidance, assistance and supervision of the management of village funds is an obligation that must be carried out

Keywords: Village Fund, Work Program, traffic road

1. PENDAHULUAN

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan peranannya sangat penting. Sebab, lalu lintas menguasai hajat hidup orang banyak. Maka penyelenggarannya harus dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Untuk mendukung tujuan Pendidikan perlu pembelajaran secara teoritis tentang keselamatan lalu lintas, dan ceramah-ceramah harus didukung dengan suatu pekerjaan yang terus menerus di sekolah melalui program kurikulum yang terstruktur. Oleh karena itu bentuk implementasi dari kurikulum pendidikan ini dapat berupa program-program yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dilakukan oleh siswa tersebut missal "Perjalanan Aman ke Sekolah" atau "Cara Aman dalam Perjalanan" Sehingga dapat diimplementasikan dalam kegiatannya sehari-hari.

2. TARGET LUARAN YANG DICAPAI

Target luaran dari kegiatan PKM yang dilaksanakan adalah:

- a. Agar generasi muda secara sadar mampu mengimplementasikan sistem nilai, yaitu etika dan budaya berlalu lintas yang aman, santun selamat, tertib, dan lancar yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Mengubah perilaku pemakai jalan (Road user behavior).
- c. Menurunkan pelanggaran dan kecelakaan berlalu lintas.

3. METODE PELAKSANAAN

Bentuk kegiatan adalah bantuan teknis/bimbingan teknis dalam mengenalkan rambu-rambu lalu lintas menggunakan alat peraga dan model bermain yang digemari anak-anak

Adapun uraian tahapan pelaksanaan program yaitu sebagai berikut:

a. Tahap perencanaan

Tahap perencanaan dilakukan dengan pembentukan dan pembekalan tim yang terdiri dari 2 orang dosen dan 5 orang mahasiswa. Selanjutnya menyusun proposal kegiatan yang akan dilaksanakan.

b. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan selama dua minggu, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi internal antara dosen dan mahasiswa untuk merumuskan tugas masing-masing ketua dan anggota.
2. Melakukan survei pendahuluan ke lokasi rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Maitara Kota Tidore Kepulauan.
3. Melakukan pertemuan dengan perangkat desa terkait maksud, tujuan, waktu serta manfaat dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini.
4. Menyusun materi untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan pembuatan spanduk kegiatan.

c. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan di SDN 1 Maitara Desa Maitara Kota Tidore Kepulauan. Jumlah peserta yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan sebanyak kurang lebih 20 orang.

1. Penyampaian Materi

Materi bimbingan teknis mencakup pengertian tentang istilah rambu-rambu lalu lintas, dan pengajaran etika dalam mengendarai kendaraan. Bentuk implementasi dari kurikulum pendidikan ini dapat berupa program-program yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dilakukan oleh siswa tersebut missal "Perjalanan Aman ke Sekolah" atau "Cara Aman dalam Perjalanan" Sehingga dapat diimplementasikan dalam kegiatannya sehari-hari. Untuk mendukung tujuan Pendidikan perlu pembelajaran secara teoritis tentang keselamatan lalu lintas, dan ceramah-ceramah harus didukung dengan suatu pekerjaan yang terus menerus di sekolah melalui program kurikulum yang terstruktur. Tujuan pendidikan berlalu-lintas tidak hanya sampai di sini saja. Para siswa yang juga didorong untuk menyebarkan informasi dan pengetahuannya tentang kebiasaan berperilaku yang baik dalam berlalu lintas pada anak-anak yang lebih kecil (child to child) dan juga pada orang tuanya. Dengan diajarkannya dasar keselamatan lalu lintas di sekolah-sekolah, anak-anak dipersiapkan untuk membangun pengetahuan tentang lalu lintas, dan sikap positif yang akan mendatangkan manfaat saat anak-anak itu

menjadi dewasa dan remaja di masa yang akan datang. Lebih mudah mengajarkan kebiasaan baik di usia dini daripada menyingkirkan kebiasaan buruk nantinya.



Gambar 1. Penyampaian materi



Gambar 1.2 Penyampaian materi



Gambar 1.3 Diskusi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bimbingan Teknis Keselamatan Lalu Lintas Usia Dini

Tujuan menyusun program untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lalu lintas melalui kurikulum pendidikan. Untuk prospek jangka panjang keselamatan jalan. Pendidikan berupaya menyiapkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam mentaati peraturan dan menghormati untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan yang lainnya, sampai kelak menjadi orang dewasa. Program kurikulum keselamatan lalu lintas dalam pendidikan harus ditentukan dengan prinsip pendidikan dan mencerminkan kebutuhan setempat tentang masalah keselamatan lalu lintas. Peran kepolisian juga diperlukan untuk datang ke sekolah-sekolah melakukan penyuluhan dan pendekatan pada siswa maupun tenaga pendidiknya (guru).

b. Bimbingan Teknis Penanaman Pengetahuan dan Simulasi Materi

Ada 4 manfaat Pendidikan Lalu Lintas di sekolah, yaitu:

1. Agar generasi muda secara sadar mampu mengimplementasikan sistem nilai, yaitu etika dan budaya berlalu lintas yang aman, santun selamat, tertib, dan lancar yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Dapat mengubah perilaku pemakai jalan (Road user behavior).
3. Menurunkan pelanggaran dan kecelakaan berlalu lintas.
4. Pendidik dan juga masyarakat dapat menyebar luaskan info lalu lintas.

c. Bimbingan Teknis Pembuatan Website Desa

Didalam website desa dimuat banyak informasi seperti sejarah desa, visi misi desa, profil desa, pemerintah desa, berita, produk desa, galeri serta laporan anggaran desa. dengan adanya website desa diharapkan sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi publik serta promosi potensi-potensi wisata desa dan produk-produk unggulan desa.

Selaras dengan fungsi website desa sebagai media informasi dan promosi. Saat ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan pada masa modern sekarang ini, namun tidak semua tempat wisata dapat berkembang dengan baik.

Salah satu faktor yang menyebabkan kurang berkembangnya tempat wisata adalah kurangnya promosi atau penyampaian informasi kepada para wisatawan. Dengan menggunakan website resmi desa, pemerintah dapat mengekspos desa ke khalayak luas dengan jaringan internet. Begitulah tujuan pembuatan website desa tidak lain adalah untuk mempublikasikan keberadaan desa ke dunia luar, sehingga mudah untuk diketahui banyak orang, menginformasikan profil dan potensi desa, mempermudah masyarakat luas untuk memperoleh informasi mengenai desa sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, menjadi wadah dokumentasi segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa, mempromosikan produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh masyarakat desa.



Gambar 5. Foto Bersama

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kegiatan Program Kemitraan ini bertujuan untuk menanamkan kecakapan dalam hal keselamatan di jalan pada anak-anak sekolah sebagai bekal bagi mereka mengenai pengetahuan sikap, etika dan perilaku berlalu lintas yang santun, aman, nyaman, tertib dan selamat, baik bagi dirinya maupun orang lain.

2. Diharapkan kegiatan bimbingan teknis ini, dapat diterapkan dalam pembangunan konstruksi yang efektif dan efisien dengan perhitungan biaya yang tepat dan ekonomis, namun bangunan konstruksi yang dihasilkan tetap sesuai dengan standar yang berlaku.

Saran

1. Perlu dibuatkan *roadmap* program kerja desa jangka panjang.
2. Diharapkan adanya koordinasi dan kerjasama yang melibatkan perangkat desa, masyarakat dan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 – Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern
- Kementerian Keuangan. 2020. Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Anonim, 1997, Manual Kapasitas Jalan Indonesia, Dirjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum.
- Edward. K. Morlok, 1985, Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi, Erlangga, Jakarta
- Siti Malkhamah, 1994, Survey, Lampu Lalu Lintas, dan Perencanaan Transportasi, KMTS FT UGM, Yogyakarta.